

Advokasi Hak Penyandang Disabilitas sebagai Gerakan Sosial Baru di Kota Semarang

Ucca Arawindha^a

^aDepartment of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences,
Universitas Brawijaya, Indonesia
uccaarawindha@ub.ac.id

Keywords:

disabled people's movement; social inclusion; resource mobilization theory; *gerakan penyandang disabilitas; inklusi sosial; teori mobilisasi sumber daya*

Abstract

This study aims to analyze the social action of Komunitas Sahabat Difabel (KSD) in advocating for the rights of persons with disabilities in Semarang. The research uses qualitative method. Data collection was conducted through interviews with disabled KSD members, KSD leaders, and the Semarang City Social Service. In addition, researchers also traced secondary data through the Semarang City BPS. The results of the research show that the social action carried out by Komunitas Sahabat Difabel (KSD) is a new social movement, because it carries humanitarian issues. In addition, in carrying out social actions, KSD uses the social media in providing education and disability awareness to the community. KSD also uses social networks in advocating for the rights of persons with disabilities in Semarang. The conclusion of this study is that KSD's social action in advocating the rights of persons with disabilities uses a strategy of mobilizing resources that are both tangible and intangible.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aksi sosial Komunitas Sahabat Difabel (KSD) dalam melakukan advokasi hak-hak penyandang disabilitas di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara pada penyandang disabilitas anggota KSD, ketua KSD, dan Dinas Sosial Kota Semarang. Selain itu, peneliti juga menelusuri data sekunder melalui BPS Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi sosial yang dilakukan oleh Komunitas Sahabat Difabel (KSD) merupakan bentuk gerakan sosial baru, karena mengusung isu kemanusiaan. Selain itu, dalam melakukan aksi sosial, KSD memanfaatkan media sosial dalam memberikan edukasi dan disability awareness pada masyarakat. KSD juga memanfaatkan jejaring sosial dalam melakukan advokasi hak-hak penyandang disabilitas di Kota Semarang. Kesimpulan penelitian ini adalah aksi sosial KSD dalam mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas menggunakan strategi mobilisasi sumber daya yang bersifat tangible maupun intangible.

Journal of Disability Studies
INKLUSI

doi Vol. 10, No. 02, 2023

[10.14421/ijds.100203](https://doi.org/10.14421/ijds.100203)

Submitted: 29 Des 2022

Accepted: 24 Nov 2023



A. Pendahuluan

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia terbilang cukup besar. Berdasarkan data Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) 2019, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah 26 juta orang dari 283, 74 juta jiwa penduduk atau sebesar 9,7 % (Tempo.co, 2021). Sejarah menunjukkan, para penyandang disabilitas diindikasikan telah diabaikan selama tiga dekade awal keberadaan PBB. Para perancang International Bill of Human Rights tidak memasukan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM (Degener, 2000). Oleh sebab itu muncul berbagai gerakan disabilitas untuk menghapuskan penindasan dan memperjuangkan hak penyandang disabilitas.

Hak penyandang disabilitas telah tertuang dalam UU No. 8 tahun 2016. Undang-undang tersebut dibuat setelah Indonesia meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011. Undang-undang tersebut megakomodasi hak-hak penyandang disabilitas, mulai dari hak pendidikan, hak politik, hak bekerja, hak berpartisipasi dalam kegiatan sosial lainnya. Salah satu elemen yang melakukan kontrol dan pengawasan terhadap implementasi dari UU tersebut adalah berbagai bentuk aksi sosial berbasis disabilitas di Indonesia. Salah satunya adalah Komunitas Sahabat Difabel (KSD) Semarang.

KSD Semarang berdiri sejak 2014 dan diinisiasi oleh orang tua penyandang disabilitas. Tujuan dibentuknya KSD adalah untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas meningkatkan potensi yang dimiliki dan membangun relasi (Mutiah & Astuti, 2018). Aksi sosial KSD merupakan salah satu bentuk gerakan sosial karena memiliki kareakteristik sebagai gerakan sosial yang dikemukakan oleh Della Porta dan Diani (2009), bahwa karakteristik utama gerakan sosial adalah jaringan interaksi informal, perasaan dan solidaritas bersama, konflik sebagai fokus isu kolektif, dan mengedepankan bentuk-bentuk protes (Porta & Diani, 2009).

Berdasarkan karakteristik gerakan sosial, KSD merupakan bentuk jaringan interaksi informal karena sifat keanggotaan tidak mengikat. Terdapat perasaan dan solidaritas bersama sebagai penyandang disabilitas dan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Selain itu, walaupun tidak melakukan aksi protes yang bersifat frontal seperti demonstrasi, pemberontakan, atau revolusi, KSD melakukan upaya-upaya untuk mengawal hak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016. Gerakan KSD bersifat humanis, bukan lagi berbasis materi seperti gerakan sosial klasik.

Terdapat berbagai gerakan sosial berbasis disabilitas di Indonesia, namun KSD Semarang merupakan gerakan yang unik, karena pendirinya bukan penyandang disabilitas. Selain itu, aksi sosial KSD beragam, mulai dari kegiatan yang bersifat *charity*, terapi/rehabilitasi, pendampingan hukum, hingga peningkatan kapasitas

untuk memandirikan penyandang disabilitas. KSD juga melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah dan swasta. Terdapat berbagai pelatihan yang dilakukan dengan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan (Mutiah & Astuti, 2018). Berdasarkan observasi awal tersebut, aksi KSD menggunakan pendekatan *medical* dan *social model*. Pendekatan *medical model*, yaitu menempatkan penyandang disabilitas sebagai suatu penyakit dan keterbatasan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas merupakan permasalahan individu penyandang disabilitas itu sendiri (Santoso & Apsari, 2017). Sedangkan, pendekatan *social model* berasumsi bahwa kurang terakomodasinya hak penyandang disabilitas bukan merupakan masalah individu penyandang disabilitas, tetapi kondisi sosial dan lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk hidup layak di masyarakat (Santoso & Apsari, 2017).

Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena bentuk pendekatan yang digunakan oleh gerakan KSD berkorelasi dengan bagaimana KSD memposisikan penyandang disabilitas di dalam masyarakat. Sehingga, perlu untuk ditelusuri cara pandang KSD terhadap penyandang disabilitas, apakah upaya-upaya yang dilakukan melalui berbagai aksi tersebut mengarah pada inklusivitas dan merupakan penghapusan terhadap bentuk penindasan terhadap penyandang disabilitas. Penelitian terdahulu mengenai gerakan sosial yang melakukan advokasi hak-hak penyandang disabilitas pernah dilakukan oleh Fx Rudy Gunawan dengan judul Eksistensi Disabilitas dalam Budaya Normalitas (Kajian 4 Gerakan Disabilitas di Indoensia). Hasil penelitian tersebut yaitu terdapat konsistensi perlawanan untuk mengubah persepsi masyarakat tentang disabilitas dan capaian-capaian pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh 4 Gerakan sosial berbasis disabilitas di Bandung (Gunawan, 2014). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berupaya mendalami secara spesifik satu gerakan sosial, yaitu KSD dan melihat terlebih dahulu bagaimana pandangan KSD terhadap penyandang disabilitas sehingga dapat mempengaruhi aksinya dalam mengadvokasi hak penyandang disabilitas.

Penelitian ini melakukan kajian secara komprehensif pada satu gerakan sosial, yaitu KSD tanpa membedakan jenis gerakan disabilitas dengan ragam disabilitas maupun identitas tertentu seperti gender atau anak-anak. Penelitian terdahulu yang melakukan penelitian pada ragam disabilitas telah dilakukan oleh Siti Sarah Agusti dengan judul yaitu Aksi Sosial Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia Jakarta (GERKATIN Jakarta) terhadap Penyandang Disabilitas Rungu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi sosial GERKATIN dapat membantu penyandang disabilitas rungu untuk mencapai kesetaraan. GERKATIN membantu penyandang disabilitas rungu agar mereka bisa mengembangkan bakat, hak yang sama dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengar (Agusti, 2023). Melalui aksi sosial yang dilakukan Gerkatin untuk mencapai kesetaraan hak penyandang disabilitas rungu, Gerkatin ingin memberikan informasi dan edukasi masyarakat tentang Tuli. Selain itu, pemerintah dapat memahami kebutuhan penyandang disabilitas rungu di bidang

informasi dan pendidikan, sehingga tidak ada lagi diskriminasi tentang bahasa isyarat Indonesia (BISINDO). Bahasa ini harus berkembang seperti bahasa Indonesia. Sama halnya, dengan BISINDO, Gerkatin juga melakukan aksi sosial terkait aksesibilitas yang masih belum terpenuhi. Ketika spesifik pada ragam disabilitas tertentu, maka gerakan tersebut berdampak hanya pada kelompok tertentu, oleh karena itulah penelitian berbasis gerakan KSD ini layak untuk dilakukan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan, karena berdasarkan penelitian terdahulu bahwa Komunitas Sahabat Difabel (KSD) selama ini banyak berperan dalam mengadvokasi hak penyandang disabilitas dalam berbagai isu, termasuk ketenagakerjaan. KSD melakukan pelatihan kerja bekerjasama dengan pemerintah, menjadi penyalur informasi lowongan kerja, menjadi fasilitator perekrutan tenaga kerja difabel, dan memberi fasilitas pemasaran produk UKM dengan membentuk Saung Happy, serta menjadi bahan pertimbangan perusahaan ketika difabel bermasalah sebagai tenaga kerja (Mutiah, 2018).

KSD juga menerapkan strategi-strategi yang bersifat humanis tanpa kekerasan dalam melakukan aksinya. Menurut penelitian terdahulu, strategi efektif dalam melakukan gerakan sosial adalah metode non-violence seperti yang dilakukan oleh Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA). Berdasarkan penelitian dengan judul Gerakan Perempuan Penyandang Disabilitas: Studi Mengenai Strategi Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dalam Memperjuangkan Eksistensi Perempuan Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) oleh Nadhirotul Ulfa dan Nur Azizah strategi yang diterapkan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan peran perempuan penyandang disabilitas, membangun penerimaan masyarakat, dan membangun perlindungan hukum untuk perempuan penyandang disabilitas (Ulfa & Azizah, 2015).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, peneliti melihat bahwa terdapat hal yang belum dibahas ketika berbicara tentang Gerakan sosial. Keempat penelitian tersebut tidak melihat model Gerakan secara utuh dan menghubungkannya dengan pendekatan dalam kajian disabilitas. Penelitian pertama hanya menarasikan aktivitas dan capaian-capaian yang dilakukan 4 gerakan sosial disabilitas di Kota Bandung, sedangkan penelitian kedua fokus terhadap isu perempuan dalam gerakan, dan penelitian ketiga fokus pada satu isu hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas, dan penelitian keempat spesifik pada isu gerakan Tuli. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian gerakan disabilitas dengan tidak melihat isu spesifik, berdasarkan gender, bidang tertentu seperti ekonomi-politik, atau ragam disabilitas. Penelitian ini juga tidak melakukan perbandingan gerakan disabilitas satu dengan yang lainnya, sehingga diharapkan data yang didapatkan akan lebih komprehensif dan mendalam. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bentuk gerakan disabilitas dan strateginya dalam melakukan pergerakan.

Riset ini bertujuan untuk menganalisis aksi sosial Komunitas Sahabat Difabel (KSD) di Kota Semarang. Peneliti menganalisis aksi sosial KSD dengan menelusuri bentuk strategi yang digunakan oleh KSD dalam mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas. Penelusuran bentuk-bentuk strategi tersebut akan dilakukan dengan mencermati berbagai agenda aksi yang dilakukan oleh KSD selama ini dan menghubungkannya dengan bentuk-bentuk aktivitas gerakan sosial baru. Diharapkan dengan menganalisis dan menarasikan model gerakan KSD tersebut akan memberikan kontribusi ilmiah dalam perkembangan kajian disabilitas dalam perspektif Sosiologis. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi prototipe bagi gerakan-gerakan berbasis disabilitas di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bertujuan untuk memahami berbagai fenomena perihal apa saja yang dialami oleh objek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan apa yang berada di balik peristiwa (Moleong, 2018). Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus berlaku apabila suatu pertanyaan bagaimana (*how*) dan mengapa (*why*) diajukan terhadap seperangkat peristiwa masa kini yang mustahil atau setidaknya sukar dikontrol periset (Salim, 2006). Tipe studi kasus yang digunakan adalah studi kasus eksplanatoris. Tujuan strategi studi kasus eksplanatoris adalah memberikan penjelasan-penjelasan untuk rangkaian peristiwa yang sama dan menunjukkan bagaimana penjelasan semacam itu mungkin bisa diterapkan pada situasi-situasi yang lain (Yin, 2017).

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam pada beberapa informan penelitian, di antaranya adalah anggota Komunitas Sahabat Difabel (KSD) yang merupakan penyandang disabilitas, Ketua KSD, dan perwakilan dari pemerintah yaitu Dinas Sosial Kota Semarang. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi dengan mengikuti beberapa kegiatan dan aksi KSD dalam melakukan advokasi hak-hak penyandang disabilitas di Kota Semarang. Peneliti juga memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial Kota Semarang untuk mendapatkan data persebaran jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang.

Teknik pengolahan data menggunakan tiga tahap simultan yaitu reduksi, display data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2005). Sedangkan pengujian keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber data, yaitu membandingkan hasil wawancara informan satu dengan yang lainnya.

C. Temuan dan Analisis

1. Dinamika Permasalahan Disabilitas di Kota Semarang

Kota Semarang telah memiliki Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan Daerah (Perda) tersebut mengatur segala hak dan aksesibilitas penyandang disabilitas di Kota Semarang, seperti hak kesehatan, hak mendapatkan pekerjaan, hak keagamaan, dan lain sebagainya. Hadirnya Perda tersebut merupakan turunan dari UU No. 8 Tahun 2016 tentang hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Perda tersebut merupakan bentuk komitmen dari pemerintah Kota Semarang dalam mengakomodasi kebutuhan dari penyandang disabilitas di Kota Semarang yang selama ini tereksklusi dalam berbagai bidang. Hal tersebut penting mengingat angka penyandang disabilitas di Kota Semarang cukup tinggi. Berikut merupakan rekapitulasi data penyandang disabilitas di Kota Semarang tahun 2019. Berdasarkan data Dinas Sosial tahun 2019, jumlah disabilitas tertinggi adalah disabilitas fisik, yaitu 2268 dari total didabilitas 5712 atau sebesar 39,71%, sedangkan jumlah terkecil adalah disabilitas ganda, yaitu 4,81% atau sebesar 275 orang. Urutan terbesar kedua adalah disabilitas sensorik, yaitu 23,25% dan urutan ketiga adalah disabilitas intelektual, yaitu 17,66% (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2022).

Berdasarkan data yang diperoleh terdapat rekapitulasi data penyandang disabilitas di Kota Semarang berdasarkan kecamatan. Jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang pada tahun 2019 adalah sebanyak 4864 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2020), jumlah tersebut tidak sinkron dengan jumlah total penyandang disabilitas berdasarkan ragam disabilitas. Namun, keduanya tergolong cukup tinggi, mengingat jumlah penduduk Kota Semarang sebesar 1.814.110 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2020), artinya terdapat kurang lebih 0,26% penyandang disabilitas di Kota Semarang yang harus diakomodasi hak dan kebutuhannya selayaknya warga negara lainnya. Hak dasar yang harus dipenuhi antara lain adalah hak pendidikan, hak ekonomi, hak politik, hak sosial dan budaya. Berikut merupakan tabel rekapitulasi data penyandang disabilitas di Kota Semarang berdasarkan kecamatan tahun 2019.

Tabel 1. Rekapitulasi Data Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2019

No.	Nama Kecamatan	Jumlah	Persentase (%)
1	Gemuk	490	10,07
2	Pedurungan	429	8,82
3	Gayamsari	304	6,25
4	Semarang Timur	465	9,56
5	Tembalang	576	11,84
6	Banyumanik	347	7,13
7	Candisari	405	8,33
8	Gajahmungkur	177	3,64
9	Gunungpati	358	7,36
10	Mijen	357	7,34
11	Ngaliyan	402	8,26
12	Tugu	153	3,15
13	Semarang Barat	401	8,24
	TOTAL	4864	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Semarang, 2022

Jumlah penyandang disabilitas tertinggi di Kota Semarang adalah Kecamatan Tembalang sebesar 11,84% atau sebanyak 576 Jiwa dari 4864 Jiwa, sedangkan jumlah penyandang disabilitas terkecil ada pada Kecamatan Tugu sebesar 3,15% atau sebanyak 153 Jiwa dari 4864 Jiwa. Tinggi dan rendahnya jumlah penyandang disabilitas di kecamatan tersebut selaras dengan Kecamatan Tembalang dengan jumlah penduduk terbesar dan Kecamatan Tugu merupakan jumlah penduduk terkecil di Kota Semarang.

Pendataan jumlah penyandang disabilitas harus dilakukan dari pintu ke pintu dan yang memiliki akses terhadap kondisi riil penyandang disabilitas adalah penyandang disabilitas itu sendiri, sehingga pelibatan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) menjadi penting dalam pendataan. Diharapkan dengan pendataan dari pintu ke pintu dapat memberikan gambaran jumlah penyandang disabilitas yang sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Data tentang jumlah penyandang disabilitas merupakan permasalahan tersendiri, hal tersebut dikarenakan data yang muncul di permukaan belum tentu mencerminkan realitas yang sebenarnya. Masih terdapat masyarakat yang menganggap disabilitas sebagai sesuatu hal yang tabu dan aib, sehingga perlu disembunyikan dan menjadi obyek belas kasihan. Hal tersebut sesuai dengan penuturan ketua Komunitas Sahabat Difabel yang menyebutkan bahwa:

Secara umum ya, pandangan masyarakat sampai saat ini menurut saya masih memandang disabilitas sebelah mata sehingga mengabaikan disabilitas, dalam tanda kutip masih berpikiran bahwa kita (disabilitas) sebagai objek yang harus dikasihani. Kita pernah menemukan kasus ini juga mbak waktu

itu di sebuah desa. Anak itu dipasung karena alasan keluarganya malu mempunyai anak seorang penyandang disabilitas, mereka bilang '*aku isin ook ndue anak kayak gitu*' [saya malu kok Mbak, punya anak seperti itu] (Huda, 2022).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, masih terdapat pandangan umum masyarakat yang menganggap penyandang disabilitas sebagai obyek belas kasihan, sehingga keberadaannya cenderung disembunyikan oleh keluarga, terutama penyandang disabilitas yang ada di pelosok pedesaan. Kondisi penyandang disabilitas di daerah perkotaan relatif berbeda, masyarakat kota memiliki keterbukaan terhadap penyandang disabilitas dan banyak melibatkan penyandang disabilitas dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Terkait dengan pemberdayaan penyandang disabilitas, daerah kota juga lebih terjangkau oleh program pemerintah dibanding dengan daerah pedesaan. Hal tersebut juga dituturkan oleh ketua KSD Semarang, bahwa penyandang disabilitas yang tinggal di perkotaan lebih dekat akses terhadap pemerintah, sehingga memudahkan komunikasi dengan dinas terkait program pemberdayaan.

Penyandang disabilitas di perkotaan lebih mudah dalam membentuk kelompok atau komunitas untuk mendorong advokasi hak penyandang disabilitas dibanding dengan penyandang disabilitas yang ada di pedesaan. Di samping itu juga, secara kapasitas sumber daya manusia, penyandang disabilitas di perkotaan lebih memiliki aksesibilitas dalam bidang pendidikan, sehingga sudah banyak yang lulusan perguruan tinggi atau SMA. Menurut Dinas Sosial kota Semarang, kurang lebih terdapat 26 komunitas atau organisasi penyandang disabilitas di Kota Semarang dengan berbagai karakteristik dan bidang masing-masing.

Kelompok disabilitas atau biasa dikenal dengan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) memainkan peran yang penting dalam pemberdayaan pada penyandang disabilitas, khususnya di Kota Semarang. Hal tersebut dituturkan oleh Kepala Bagian Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial, Kota Semarang bahwa selama ini OPD yang melakukan "jemput bola" untuk program pemberdayaan dan berkomunikasi dengan Dinas Sosial sebagai perwakilan pemerintah. Menurut Tri Redjeki, selaku Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, selama ini KSD sebagai OPD melakukan banyak kegiatan untuk meningkatkan kapasitas anak-anak dengan disabilitas, seperti aktif dalam Forum Keluarga Komunitas Anak Disabilitas (FKKAD) dengan berbagai kegiatan, yaitu peningkatan kepercayaan diri seperti latihan tari, master of ceremony (MC), musik, dan lain sebagainya, serta program parenting bagi orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas.

Menurut penuturan Tri Redjeki, kota Semarang saat ini pada tahap mendorong untuk menjadi kota inklusif. Hal tersebut didukung dengan dibangunnya infrastruktur publik yang ramah penyandang disabilitas, seperti tempat ibadah, guiding block untuk

disabilitas netra, dan jalur kursi roda. Selain itu, beberapa karyawan di Dinas Sosial Kota Semarang merupakan penyandang disabilitas, yaitu penyandang disabilitas fisik dan netra. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat komitmen dari kota Semarang untuk mengakomodasi penyandang disabilitas di instansi pemerintah. Pada bidang perekonomian, terdapat 126 UMKM khusus penyandang disabilitas di Kota Semarang yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang (HIMIK). Beberapa inisiasi tersebut merupakan upaya untuk mendorong kota Semarang agar lebih inklusif dan ramah penyandang disabilitas. Pemerintah kota Semarang juga melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi maupun swasta, seperti kolaborasi dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan dalam pengadaan kursi roda, pengadaan alat bantu dengar, dan pembangunan infrastruktur ramah disabilitas.

Upaya kota Semarang menuju kota inklusif tidak terlepas dari berbagai kendala. Masih terdapat pandangan masyarakat yang negatif terhadap penyandang disabilitas merupakan pekerjaan rumah yang harus menjadi prioritas untuk diselesaikan. Hal tersebut dikarenakan, lingkungan tempat penyandang disabilitas tinggal merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap penyandang disabilitas. Rasa percaya diri untuk berbaaur dengan masyarakat umum ditumbuhkan dari lingkungan sosial yang melakukan penerimaan terhadap penyandang disabilitas dengan baik dan ramah. Di beberapa bidang seperti pendidikan juga masih terdapat permasalahan terkait disabilitas. Diantaranya adalah kurang tersedianya Guru Pendamping Khusus (GPK) pada sekolah inklusi. Fasilitas sarana prasarana pembelajaran juga masih kurang lengkap. Selain itu, masih terdapat perlakuan diskriminatif terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di sekolah inklusi. Hal tersebut didukung dengan kutipan wawancara berikut:

Tapi kadang sekolahnya juga belum siap untuk menerima penyandang disabilitas dan murid-murid lainnya kadang justru membully si penyandang disabilitas-nya, karena ada Mbak yang penari itu, dia itu disabilitas rungu, dia pintar dan masuk SMA inklusi tapi di sana dia dibully karena kan kalau disabilitas rungu nek diajak omong sulit **to** apalagi sekarang kan pakai masker, nah kalau disabilitas rungu itu harus lihat pakai gerak bibir atau pakai bisindo, tapi di sana itu siapa yang bisa bisindo? (Redjeki, 2022).

Selain dalam bidang pendidikan, yang menjadi permasalahan di Kota Semarang adalah bidang transportasi umum yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Seperti contohnya halte pada Bus Rapid Transit (BRT) Semarang belum aksesibel bagi penyandang disabilitas. Beberapa penyandang disabilitas mengeluhkan banyak yang jatuh karena jarak antara halte dan bus terlalu lebar, sehingga sulit diakses bagi penyandang disabilitas fisik dan juga tidak ada petunjuk bagi disabilitas netra.

Kota Semarang dengan berbagai dinamika permasalahan terkait disabilitas telah berkomitmen untuk menjadi kota inklusif dan ramah disabilitas. Walaupun dengan berbagai kendala, namun terdapat upaya-upaya baik yang telah dilakukan baik oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun swasta. Menuju kota inklusif bukanlah hal mudah, oleh sebab itulah perlu adanya sinergi antara berbagai pihak agar terwujud.

2. Aksi Komunitas Sahabat Difabel (KSD) Semarang sebagai Bentuk Gerakan Sosial Baru

Komunitas Sahabat Difabel (KSD) Semarang merupakan salah satu Organisasi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang yang aktif melakukan pemberdayaan pada penyandang disabilitas melalui berbagai aksi sosial. Aksi sosial yang dilakukan oleh KSD berupa charity, rehabilitasi, advokasi, maupun pelatihan-pelatihan pada penyandang disabilitas. Charity dapat berupa pemberian bantuan alat pada disabilitas, sedangkan advokasi berkaitan dengan upaya mendorong terakomodasinya hak penyandang disabilitas dalam berbagai bidang di Kota Semarang, dan terakhir adalah pelatihan-pelatihan sebagai upaya meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas.

Berdasarkan teori, pendekatan yang dilakukan oleh KSD termasuk *bio-social model*, yaitu menggabungkan pendekatan medis dan juga pendekatan sosial (Andriani, 2017). Kondisi penyandang disabilitas terjadi karena bertemunya hambatan individu karena kondisi tubuh, mental dan intelektual dengan hambatan sosial yaitu lingkungan fisik yang tidak memudahkan untuk beraktivitas harian secara mandiri dengan aman, serta lingkungan sosial yang tidak memperlakukan individu penyandang disabilitas secara positif atau bahkan melakukan penolakan secara langsung atau tidak langsung sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan ruang partisipasi secara penuh dalam masyarakat dan pembuatan kebijakan.

Selain itu KSD juga melakukan upaya edukasi dan sosialisasi melalui media sosial youtube dan Instagram (@ksd.semarang dan @roemahdifabelsmg). Unggahan pada media sosial berupa kegiatan atau aksi sosial yang dilakukan oleh KSD selama ini dengan membaurkan penyandang disabilitas dengan masyarakat luas. Secara teoritis yang dilakukan oleh KSD tergolong sebagai bentuk gerakan sosial baru.

Menurut Singh (2011) yang juga disebut dalam Sukmana (2016), secara umum bentuk teoritis Gerakan Sosial dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yakni: 1) Klasik, 2) Neo-klasik, dan 3) Gerakan Sosial Baru (kontemporer) (Singh, 2001; Sukmana, 2016). Masih menurut Singh, bahwa teori klasik meliputi sebagian besar studi-studi dalam perilaku kolektif seperti adanya kerumunan, kerusuhan, dan penolakan atau pembangkangan dan lebih menuju ke isu materialistik seperti anti kapitalisme, revolusi kelas, dan perjuangan kelas. Sementara tradisi neo-klasik juga masih dihubungkan dengan tradisi utama dalam studi Gerakan Sosial lama.

Kemudian untuk Gerakan Sosial Baru yang muncul sekitar tahun 1960 – 1970-an lebih mendasarkan pada isu humanis, kultural, dan non-materialistik. Tujuan Gerakan Sosial Baru ini juga untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan kondisi kehidupan manusia ke arah yang lebih baik lagi (Singh, 2001, hlm. 111).

Berdasarkan teori tersebut, maka aksi yang dilakukan Komunitas Sahabat Difabel (KSD) kota Semarang merupakan bentuk gerakan sosial baru. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan isu utama yang diusung, yaitu humanisme. Isu humanis dapat ditunjukkan dengan fokus utama dari KSD adalah memberdayakan penyandang disabilitas yang ada di Kota Semarang. Aksi-aksi yang dilakukan oleh KSD meliputi upaya penyadaran pada masyarakat tentang keterbukaan terhadap penerimaan pada penyandang disabilitas dan upaya menghilangkan stigma serta diskriminasi pada penyandang disabilitas. Peningkatan kapasitas penyandang disabilitas merupakan salah satu upaya penghapusan stigma “tidak mampu” pada penyandang disabilitas. KSD membekali penyandang disabilitas dengan skill dan menunjukkan pada masyarakat melalui media sosial maupun melalui kegiatan. Adanya Roemah Difabel merupakan salah satu bentuk mewadahi karya dan kreativitas penyandang disabilitas dan upaya penyampaian “pesan” pada masyarakat bahwa penyandang disabilitas mampu berdaya.

Berbeda dengan gerakan sosial klasik atau neo-klasik yang memiliki fokus utama pada materi dan perjuangan kelas. KSD tidak melakukan upaya memperjuangkan kelas tertentu, namun titik tekan aksi sosial KSD lebih kepada perjuangan kemanusiaan untuk menuju kehidupan yang lebih baik, yaitu inklusivitas. GSB mengalami pergeseran dari isu-isu redistributif ke isu-isu kualitas hidup dan pascamaterial. Perspektif ini melihat gerakan- gerakan kontemporer sebagai respons terhadap ketidakcakapan struktur politik dan ekonomi masyarakat pascaindustrial. Ia berbeda dengan gerakan-gerakan lain karena struktur organisasinya yang terdesentralisasi, menggunakan taktik inkonvensional, dan fokusnya pada isu-isu budaya dan identitas (Manulu, 2016). Hal tersebut sesuai dengan KSD yang mengusung isu identitas sosial, yaitu disabilitas.

Selain itu, aksi sosial yang dilakukan KSD tidak menggunakan perlawanan dengan kekerasan seperti pemberontakan atau kerusuhan, namun lebih pada advokasi dan edukasi. Meskipun demikian, aksi yang dilakukan KSD sarat dengan konteks protes seperti gerakan sosial pada umumnya. Gerakan sosial, menurut Singh, biasanya merupakan mobilisasi untuk menentang negara dan sistem pemerintahannya, yang tidak selalu menggunakan kekerasan dan pemberontakan bersenjata, sebagaimana terjadi dalam kerusuhan, pemberontakan, dan revolusi (Sukmana, 2016). Menurutnya, umumnya gerakan sosial menyatakan dirinya di dalam kerangka nilai demokratis.

Protes yang dilakukan oleh KSD bukanlah perlawanan “langsung” pada negara, namun pada kondisi sosial yang selama ini tidak mengakomodasi hak-hak penyandang disabilitas. Tarrow (1996), mendefinisikan gerakan sosial sebagai tantangan kolektif yang dilakukan sekelompok orang yang memiliki tujuan dan solidaritas yang sama, dalam konteks interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, lawan, dan penguasa (Tarrow, 1996). Perspektif kultural (gerakan sosial baru/ GSB) berkembang sebagai wujud ketidakpuasan pada institusi-institusi sosial dan politik masyarakat kapitalis maju, yakni transformasi dari masyarakat industrial ke pascaindustrial yang semakin menisbikan batas-batas kelas. Perspektif ini menempatkan konstruksi dan politisasi identitas sebagai perekat para partisipan di dalam keterlibatannya di dalam gerakan sosial.

Partisipan di dalam gerakan ini umumnya berasal dari kelas menengah baru, kaum terdidik, sering kali bekerja di sektor-sektor nonproduksi, seperti akademisi, seniman, pekerja sosial kemanusiaan, LSM, dan kaum yang (relatif) terdidik lainnya. Partisipan KSD terdiri dari berbagai entitas masyarakat, yaitu akademisi, orang tua disabilitas, seniman, dan pekerja sosial. KSD juga melakukan sinergitas dengan berbagai pihak seperti pemerintah melalui Dinas Sosial, kolaborasi dengan swasta melalui CSR perusahaan, dan dengan berbagai organisasi disabilitas lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa KSD memiliki ciri sebagai GSB, yaitu partisipan bukan berasal dari kelas tertentu, tetapi terdiri dari berbagai entitas kelas menengah baru.

Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu Gerakan Sosial menurut Locher (2002) yang juga disebutkan dalam Sukmana (2013) menyebutkan beberapa faktor (Locher, 2002, hlm. 271; Sukmana, 2013), yakni:

1. *Leadership: Effective Leadership* (Kepemimpinan: Kepemimpinan yang Efektif). Pemimpin yang efektif ialah individu yang memahami system hukum dan politik yang berfungsi efektif dalam diri mereka. Mereka yang menjadi pemimpin Gerakan Sosial memusatkan perhatian kepada tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari kelompok, mampu menjelaskan kepada pihak luar tentang rasionalitas dan tujuan kelompok, serta kemampuannya untuk dapat memberikan inspirasi dan mengajak orang lain untuk mengikuti aksi gerakan yang dilakukan. Pemimpin dari Komunitas Sahabat Difabel (KSD) merupakan penyandang disabilitas fisik dan asli Semarang. Saat ini merupakan DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia, Anggota Komisi D, Jawa Tengah. Ketua KSD aktif berorganisasi di bidang disabilitas sejak 2016. Profil dari ketua KSD menunjukkan bahwa pemimpin dari gerakan ini memiliki kepemimpinan yang efektif, memahami sistem hukum dan politik terkait kebijakan yang diperuntukkan penyandang disabilitas. Ketua KSD memiliki kemampuan untuk mengajak orang lain dalam mengikuti aksi gerakan, hal tersebut ditunjukkan dari keterlibatan secara aktif dalam organisasi di luar gerakan untuk mendorong disability awareness pada masyarakat luas.

2. *Image: Positive Image* (Citra: Citra Positif). Citra atau gambaran yang ditampilkan oleh kelompok kepada pihak luar bertujuan agar mereka dihargai dan untuk meyakinkan semua pihak termasuk pemegang otoritas bahwa gerakan yang dilakukan bertujuan baik dan positif sehingga kondisi ini akan memudahkan mereka untuk mendapatkan dukungan keyakinan public. Citra positif dari KSD ditunjukkan melalui sosialisasi dan edukasi pada media sosial. Kegiatan KSD dalam melakukan pemberdayaan dan advokasi pada penyandang disabilitas ditunjukkan di instagram @ksd.semarang dan @roemahdifabelsmg. Konsistensi dari KSD dalam melakukan advokasi pada hak penyandang disabilitas merupakan bentuk meyakinkan publik atas komitmen KSD dalam melakukan pergerakan.

3. *Tactics: Socially Accepted Tactics* (Taktik: Taktik yang Dapat Diterima secara sosial). Taktik-taktik atau cara yang dilakukan untuk melakukan gerakan dalam upaya mencapai tujuan dinilai dapat memberikan dampak terhadap pembentukan rasa hormat dan citra positif dari masyarakat serta pemegang otoritas. Taktik yang digunakan oleh KSD menggunakan mobilisasi sumberdaya. KSD memanfaatkan sumberdaya yang tangible maupun intangible dalam mencapai tujuan dari gerakan. Penerimaan sosial atas taktik tersebut didukung oleh pernyataan berikut:

Secara umum sudah bagus sih mbak, kayak KSD. Mereka itu kan punya kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar untuk penyandang disabilitas ya, mereka juga kemarin baru buka Roemah Difabel yang baru ya di Puspowarno ya. (Redjeki, 2022).

4. *Goals: Socially Acceptable Goals* (Tujuan: Tujuan yang Dapat Diterima secara Sosial). Gerakan Sosial yang berhasil tentunya memiliki tujuan yang berguna untuk kepentingan masyarakat dan tidak bermaksud merugikan kepentingan mereka. Berdasarkan data yang didapat dari dokumen pribadi Komunitas Sahabat Difabel kota Semarang menyebutkan bahwa, awal mula berdirinya komunitas ini karena adanya keresahan dari beberapa orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Mereka melihat bahwa saat itu, organisasi penyandang disabilitas yang ada di Semarang dan Indonesia rata-rata satu organisasi hanya untuk satu ragam disabilitas. Kemudian, mereka mempunyai mimpi untuk mendirikan satu organisasi yang mampumengadvokasi hak, ide, kebutuhan, dan harapan dari seluruh ragam penyandang disabilitas.

Berdasarkan sejarah berdirinya KSD tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dibentuknya KSD adalah untuk mengakomodasi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas dari berbagai ragam. Hal tersebut menunjukkan bahwa gerakan KSD memiliki tujuan yang dapat diterima oleh masyarakat, karena menuju perubahan ke arah lebih baik. Tujuan baik tersebut juga tertuang dalam visi KSD, yaitu “menciptakan sahabat difabel yang tangguh, mandiri, dan berkarya” (KSD, 2017).

5. *Support: Cultivated Financial and Political Support* (Dukungan: Pembudayaan Dukungan Politik dan Finansial). Suatu Gerakan Sosial memperoleh dukungan dan dana dari jaringan kelompok, organisasi, dan institusi lainnya. Berdasarkan dokumen pribadi KSD, hingga tahun 2022, KSD memiliki kerjasama dengan 34 instansi, baik pemerintah maupun swasta. Beberapa organisasi pemerintah seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bappenas, Ombudsman, dan Bakespangpol. Selain itu juga bekerjasama dengan PT. KAI, PT. PLN, BRI, TVRI, PT. Pegadaian, dan beberapa universitas. Kerjasama tersebut dapat berupa bantuan sosial, bantuan dana, jejaring advokasi, media edukasi dan sosialisasi.

3. Strategi Komunitas Sahabat Difabel (KSD) Semarang dalam Melakukan Advokasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang

Strategi Komunitas Sahabat Difabel (KSD) Semarang adalah memobilisasi sumberdaya yang dimiliki, baik sumberdaya yang bersifat tangible maupun intangible. Sumberdaya *tangible* dapat berupa media sosial, sarana dan prasarana, serta alat komunikasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari gerakan. Sedangkan, sumberdaya *intangible* berupa kapabilitas sumberdaya manusia yang menggerakkan aksi KSD. Menurut kajian gerakan sosial, yang dilakukan oleh KSD termasuk dalam *Resource Mobilization Theory* (RMT) yang pertama kali diperkenalkan oleh Anthony Oberschall.

Resource Mobilization Theory (RMT), memfokuskan perhatiannya kepada proses-proses sosial yang memungkinkan muncul dan berhasilnya suatu gerakan. Faktor organisasi dan kepemimpinan merupakan faktor yang dapat mendorong atau menghambat suatu gerakan sosial (*social movements*). Menurut Oberschall dalam Locher (2002), istilah mobilisasi (*mobilization*) mengacu kepada proses pembentukan kerumunan, kelompok, asosiasi, dan organisasi untuk mencapai suatu tujuan kolektif (Locher, 2002). Berdirinya KSD memiliki faktor keorganisasian dan kepemimpinan yang kuat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memandirikan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, terdapat beberapa bentuk kegiatan KSD yang mengarah pada tujuan kolektif tersebut dengan memanfaatkan sumberdaya yang mereka miliki.

KSD secara organisatoris terbagi menjadi beberapa elemen, diantaranya adalah pembina, penasehat, pengurus dan anggota. Pembina memiliki tugas untuk menjaga serta mengevaluasi jalannya kegiatan, dan memberikan saran-saran jika ada permasalahan atau hambatan yang muncul. Pembina akan berkoordinasi dengan penasehat untuk memberikan saran-saran dan solusi untuk membawa KSD menjadi lebih upgrade lagi. Penasehat memiliki tupoksi beriringan dengan pembina yakni memastikan tidak ada permasalahan selama pelaksanaan kegiatan dalam komunitas dan memberikan saran serta solusi jika memang menemui permasalahan atau hambatan. Sedangkan pengurus harian bertugas untuk menjalankan kegiatan yang menjadi program kerja dari KSD.

Hingga 2022, KSD telah memberdayakan 46 penyandang disabilitas yang menjadi anggota dengan berbagai karakteristik. Berdasarkan dokumen dari KSD, anggota KSD yang aktif hingga 2022 terdiri dari 48% laki-laki atau sebanyak 22 orang dari 46 anggota dan 52% perempuan atau sebanyak 24 orang dari total 46 anggota. Hal tersebut menunjukkan bahwa keanggotaan KSD mengakomodasi gender representatif, terdapat keterwakilan anggota laki-laki maupun perempuan.

Rincian 46 anggota KSD dapat dijabarkan bahwa ragam disabilitas terbanyak anggota KSD adalah disabilitas intelektual, yaitu 32, 61% atau sebanyak 15 orang, secara berurutan terbanyak kedua adalah autisme, yaitu 30,43% atau sebanyak 14 orang, selanjutnya adalah cerebral palsy sebanyak 8 orang atau 17,38%, disabilitas sensorik sebanyak 7 orang atau 15,22%, dan terakhir adalah disabilitas ganda sebanyak 2 orang atau 4,35% (Dokumen KSD, 2022).

Keanggotaan KSD mulai dari pembina, penasehat, pengurus, hingga anggota merupakan bentuk sumberdaya intangible yang dapat menjadi modal keberhasilan dari gerakan sosial KSD. Sumberdaya manusia yang terlibat dalam gerakan disebut sebagai partisipan. Menurut Fireman dan Gamson dalam (Pichardo, 1988), esensi dari Resource Mobilization Theory (RMT) adalah upaya untuk mencari basis rasionalitas tentang bentuk dan partisipasi dalam suatu gerakan sosial (Pichardo, 1988) bernal. Bentuk rasionalisasi partisipasi adalah memahami mengapa individu terlibat dalam suatu perilaku kolektif, maka harus dianalisis tentang konsep imbalan dan biaya (*reward and cost*) yang dialami oleh individu tersebut. Imbalan tidak harus berupa uang, tetapi juga dapat berupa prestise, peningkatan kapasitas, keamanan personal, dll. Partisipan KSD mendapatkan reward berupa prestise dan peningkatan kapasitas ketika dilibatkan dalam pelatihan dan advokasi. Seperti yang diungkapkan oleh anggota KSD berikut,

KSD itu kan Bergeraknya secara internal itu kan mendidik anak-anak ya mbak, memberikan pelatihan keterampilan kayak menjahit, *public speaking*, dan banyak lainnya kemudian tujuannya untuk kedepannya mereka bisa bekerja di luar. (Suin, 2022).

Menurut penuturan informan, bahwa KSD selama ini telah melakukan bentuk aksi yang tepat untuk penyandang disabilitas, karena peningkatan kapasitas disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Para pengurus dan relawan dari KSD beberapa juga merupakan penyandang disabilitas, sehingga mereka juga mendapatkan manfaat dari keterlibatan di KSD.

Selain itu, KSD memiliki jejaring yang luas baik dengan pemerintah maupun dengan swasta. Hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk modal sumber daya intangible yang dimobilisasi untuk mencapai tujuan dari gerakan. Kerjasama dengan berbagai pihak tersebut berbentuk *charity* maupun peningkatan *soft skill* partisipan, artinya masih dalam konteks pemberdayaan penyandang disabilitas.

Kekuatan utama dalam melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki oleh gerakan tidak terlepas dari adanya aktor. Pendekatan RMT memusatkan analisisnya pada seperangkat proses kontekstual (keputusan mengenai pengelolaan sumberdaya, dinamika organisasi, serta perubahan politik) yang memungkinkan gerakan sosial untuk mengoptimalkan potensi-potensi struktural yang dimiliki guna mencapai tujuannya. Pendekatan ini menganalisis bagaimana para aktor gerakan sosial mengembangkan strategi dan berinteraksi dengan lingkungannya untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka. Aktor utama dalam aksi KSD sebagai sebuah gerakan sosial adalah *founder* dari KSD, yaitu Noviana Dibyantari.

Komunitas Sahabat Difabel (KSD) merupakan Komunitas yang terbentuk karena adanya keresahan serta harapan para penyandang disabilitas akan suatu wadah/konsorsium yang mampu menampung segala ragam disabilitas tanpa batas maupun diskriminasi. Komunitas Sahabat Difabel (KSD) Semarang ini didirikan oleh Noviana Dibyantari. Noviana Dibyantari memiliki anak dengan disabilitas intelektual. Perjalanan KSD berawal dari aktivitas diskusi dan berbagi pengalaman para orang tua yang memiliki anak-anak difabel di *group* Facebook pada tahun 2014. Setelah berjalan setahun di dunia maya, kemudian di tahun 2015 beberapa orang tua berinisiatif mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat umum terkait penyandang disabilitas. Hingga saat ini KSD berkembang dengan berbagai aktor penggerak yang memiliki kapasitas organisatoris dan studi disabilitas.

Sumberdaya yang dimobilisasi oleh KSD dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tidak hanya yang bersifat *intangible*, tetapi juga *tangible*. Sumber daya *tangible* berupa adanya basecamp untuk aktivitas dari KSD dalam melakukan kegiatan. *Basecamp* tersebut disebut sebagai Roemah Difabel. Roemah Difabel adalah basecamp dari Komunitas Sahabat Difabel untuk inspirasi, kreatifitas, solusi dan saling berbagi tentang penyandang disabilitas di kota Semarang. Kegiatan yang rutin KSD lakukan antara lain adalah advokasi pengembangan aksesibilitas di Kota Semarang; pelatihan dan pengembangan diri para Penyandang Disabilitas tidak terbatas di Roemah Difabel; berbagi kasih dan santunan melalui donasi dan bantuan lainnya; mengedepankan akses kesehatan tidak hanya penyandang disabilitas melainkan kelompok rentan juga dengan percepatan vaksinasi dan posyandu difabel; serta mengenalkan mindset baru kepada masyarakat luas terkait empati dan etika berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan paparan mengenai kegiatan pemberdayaan dan advokasi yang dilakukan oleh KSD tersebut, maka strategi RMT yang digunakan oleh KSD termasuk model *The Organizational-entrepreneurial model (The Professional organizer models)*. Model ini dikembangkan oleh McCarthy dan Zald (Sukmana, 2013). Model ini memandang bahwa dinamika organisasional, kepemimpinan dan pengelolaan sumberdaya merupakan faktor yang lebih signifikan dalam menentukan keberhasilan gerakan sosial. Model ini pada dasarnya mengaplikasikan teori pengembangan organisasi untuk menganalisis gerakan sosial serta memandang bahwa organisasi formal merupakan *carriers of social movements*. Organisasi gerakan sosial adalah suatu organisasi yang kompleks, atau formal, yang mengidentikkan tujuannya dengan preferensi dari gerakan sosial dan berusaha mewujudkan pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

Setiap Social Movement Organization (SMO) harus mampu mengelola sumber-sumber (*resources*) yang tersedia dengan baik. Sumber-sumber dimaksud meliputi sumber-sumber material (*tangible*), seperti pekerjaan (*jobs*), penghasilan (*income*), dan tabungan (*savings*), serta sumber-sumber non-material (*intangible*) seperti wewenang (*authority*) komitmen moral (*moral commitment*), kepercayaan (*trust*), persahabatan (*friendship*), kemampuan (*skills*) dan sebagainya. KSD sebagai bentuk *Social Movement Organization* memiliki kemampuan mengelola sumber daya yang bersifat material maupun non material. Terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya non material berupa kepercayaan, persahabatan, dan komitmen moral, KSD yang terdiri dari sebagian besar penyandang disabilitas merupakan modal sumberdaya non material yang kuat untuk mendorong keberhasilan dan pencapaian tujuan gerakan sosial.

Berdasarkan sejarah terbentuknya dan perkembangan KSD sebagai sebuah gerakan sosial, KSD mengalami dinamika dalam memandang penyandang disabilitas. Pandangan awal KSD berangkat dari model medis, yaitu kondisi disabilitas merupakan sesuatu yang diperbaiki. Hal tersebut mempengaruhi aksi dari KSD dalam melakukan pendampingan pada penyandang disabilitas. Aksi yang dipengaruhi oleh model medis tersebut terwujud dalam bentuk terapi bagi penyandang disabilitas. Aksi melakukan terapi pada penyandang disabilitas dibutuhkan terutama bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk meningkatkan tumbuh kembangnya. KSD juga menggunakan pendekatan model sosial dalam setiap aksinya. Hal tersebut ditunjukkan dengan aksi-aksi KSD dalam menghilangkan hambatan sosial dengan memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dan berpartisipasi aktif dalam setiap bidang kehidupan. KSD saat ini menggabungkan pendekatan model medis dan model sosial dalam setiap aksinya sebagai gerakan sosial atau yang biasa disebut sebagai *bio-social model*.

Menurut pendapat Bernal dan Roca perkembangan pendekatan dan teori disabilitas dipengaruhi oleh gerakan sosial penyandang disabilitas (Gómez Bernal & Roca, 2016). Evolusi dalam pemahaman tentang disabilitas dan teorisasinya bukanlah proses yang terisolasi dari kenyataan, dan terjadi dalam ranah gagasan. Bernal dan Roca menunjukkan bahwa hal-hal tersebut terkait erat dengan peristiwa-peristiwa sosial-politik, budaya dan ekonomi. Gerakan sosial kelompok marginal banyak muncul di AS, Inggris, dan negara-negara Skandinavia, beberapa kelompok tertindas (seperti masyarakat kulit hitam, etnis minoritas, perempuan, dan penyandang disabilitas) telah meluncurkan gerakan sosial yang mengecam situasi marginalisasi yang mereka alami dan menuntut pengakuan atas penyebab sosial dari marginalisasi tersebut. Berbagai gerakan tersebut kemudian berpengaruh pada perkembangan teori dan pendekatan disabilitas. Oleh sebab itulah, pendekatan yang digunakan oleh KSD berjalan linier dengan bagaimana aksi mereka melakukan advokasi hak-hak penyandang disabilitas di Kota Semarang sebagai sebuah gerakan sosial. Pendapat Bernal dan Roca tersebut menjelaskan bahwa terdapat korelasi antara gerakan sosial disabilitas dan pendekatan atau teori disabilitas.

D. Kesimpulan

Tulisan ini menjelaskan tentang advokasi hak penyandang disabilitas sebagai gerakan sosial baru di Semarang dengan mengambil studi kasus aksi sosial Komunitas Sahabat Difabel (KSD). KSD memiliki aksi sosial berupa berbagai kegiatan dalam bentuk charity, advokasi, dan pemberdayaan pada penyandang disabilitas di Kota Semarang. Aksi sosial yang dilakukan oleh KSD tersebut merupakan bentuk gerakan sosial baru, karena mengusung isu humanis dengan menggunakan strategi mobilisasi sumberdaya.

KSD hadir untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Semarang terkait isu inklusi sosial dan disabilitas. KSD merupakan wadah bagi penyandang disabilitas dengan berbagai ragam untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan/kreativitas, dan bersama-sama menghapuskan stigma dan segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di Kota Semarang. Hadirnya KSD dengan berbagai kegiatan yang berkolaborasi dengan pihak pemerintah maupun swasta dan dipublikasikan melalui media sosial membangun disability awareness dan mengedukasi masyarakat luas. Strategi yang digunakan oleh KSD yaitu memobilisasi sumberdaya baik material maupun non material mampu mendorong keberhasilan dan pencapaian tujuan dari gerakan sosial. Bentuk organisasi yang solid, kepemimpinan dan keberadaan aktor yang kuat, serta komitmen partisipan merupakan modal sumberdaya yang besar dalam keberhasilan aksi KSD sebagai gerakan sosial baru di Kota Semarang.

Kesimpulan dari tulisan ini adalah berbagai aksi yang dilakukan oleh KSD merupakan bentuk gerakan sosial baru dan memiliki korelasi dengan pendekatan atau teori disabilitas. Hal ini berarti bahwa aksi sosial yang dilakukan oleh KSD dipengaruhi oleh pandangan KSD terhadap penyandang disabilitas, yaitu pandangan dengan pendekatan bio-social model disability.

E. Catatan

Naskah merupakan hasil penelitian yang didanai melalui skema Hibah Penelitian Mandiri, Badan Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (BPPM), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang.

F. Referensi

- Agusti, S. S. (2023). Aksi Sosial Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia Jakarta (GERKATIN Jakarta) terhadap Penyandang Disabilitas Rungu. *Jurnal Community Online*, 2(2), Article 2.
- Andriani, N. S. (2017). Kebijakan Responsif Disabilitas: Pengarusutamaan Manajemen Kebijakan di Level Daerah, Nasional dan Internasional. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.21043/palastren.v9i1.2056>
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2020). Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa), 2020-2022 [Pemerintah]. Badan Pusat Statistik Kota Semarang. <https://semarangkota.bps.go.id/indicator/12/78/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2022). Jumlah Penyandang Cacat Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang 2022 [Pemerintah]. Badan Pusat Statistik Kota Semarang. <https://semarangkab.bps.go.id/indicator/27/635/1/jumlah-penyandang-cacat-menurut-kecamatan-di-kabupaten-semarang.html>
- Degener, T. (Ed.). (2000). International Disability Law - A New Legal Subject on the Rise: The Interregional Experts' Meeting in Hong Kong, December 13-17, 1999. *Berkeley Journal of International Law*, 18(1), 180-195. <https://doi.org/10.15779/Z383P9C>
- Gómez Bernal, V., & Roca, B. (2016). Disability, Social Movements and Radical Theory: An Anthropological Approach. *Anthropological Notebooks*, 22(2), 79-92.
- Gunawan, F. R. (2014). Kamu Cacat Maka Aku Ada, Eksistensi Disabilitas dalam Budaya Normalitas. Universitas Sanata Dharma.

Locher, D. A. (2002). *Collective Behavior*. Prentice Hall.

Manulu, D. (2016). Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik: Kasus Perlawanan Masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama, di Porsea, Sumatera Utara. *Populasi*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.22146/jp.12066>

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2005). *Qualitative Data Analysis (Terjemahan)*. UI Press.

Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Mutiah, A. A., & Astuti, P. (2018). Peran Komunitas Sahabat Difabel dalam Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Penyandang Difabel Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(2), Article 2.

Pichardo, N. A. (1988). Resource Mobilization: An Analysis of Conflicting Theoretical Variations. *The Sociological Quarterly*, 29(1), 97–110. <https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1988.tb01245.x>

Porta, D. della, & Diani, M. (2009). *Social Movements: An Introduction*. John Wiley & Sons.

Salim, A. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif (Edisi Kedua)*. PT Tiara Wacana.

Santoso, M. B., & Apsari, N. C. (2017). Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 166–176. <http://dx.doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.6>.

Singh, R. (2001). *Social Movements, Old and New: A Post-Modernist Critique*. SAGE Publications.

Sukmana, O. (2013). Konvergensi Antara Resource Mobilization theory Dan Identity-oriented Theory dalam Studi Gerakan Sosial Baru. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 8(1), 39–62.

Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Intrans Publishing.

Tarrow, S. (1996). Social Movements in Contentious Politics: A Review Article. *The American Political Science Review*, 90(4), 874–883. <https://doi.org/10.2307/2945851>

- Tempo.co. (2021, Oktober 1). Hak Aksesibilitas Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas [Berita]. Article 33 Indonesia. <https://article33.or.id/id/berita/tempo-co-hak-aksesibilitas-kesehatan-untuk-penyandang-disabilitas/#:~:text=Berdasarkan%20data%20Survei%20Sosial%2DEkonomi,atau%20sekitar%2026%20juta%20orang>.
- Ulfa, N. (2015). Gerakan Perempuan Penyandang Disabilitas:(Studi Mengenai Strategi Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak(SAPDA) dalam Memperjuangkan Eksistensi Perempuan Penyandang Disabilitas Di Daerah Istimewa Y [Skripsi, Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/123265>
- Yin, R. K. (2017). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th edition). SAGE Publications, Inc.

left blank